

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan nasional yang terjadi di semua wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam buku yang dikarang oleh Keynes (1936), yang mengemukakan masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama “*poverty in the midst of plenty*” yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan.

Salah satu wilayah yang cukup tinggi tingkat kemiskinannya adalah Pulau Jawa. Sebanyak 12,56 juta penduduk miskin yang menghuni Pulau Jawa dengan jumlah persentase sebesar 8,29%, artinya setengah populasi penduduk miskin di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Sementara untuk jumlah penduduk miskin terendah yaitu Pulau Kalimantan dengan jumlah 961,51 ribu orang, atau setara 5,81% (Badan Pusat Statistik, 2019). Pada Pulau Jawa terdapat provinsi termuda atau provinsi baru diantara provinsi lainnya yaitu provinsi Banten yang lokasinya berada di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Persentase tingkat kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Banten, data statistik BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa setiap tahunnya tingkat kemiskinan memiliki persentase yang jauh berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten yang menagindikasikan masih terjadi ketidakmerataan penduduk miskin, sehingga dapat dikatakan masih belum stabilnya pergerakan jumlah kemiskinan Provinsi Banten (Pradipta & Dewi, 2020).

Sektor yang paling terdampak dari adanya kemiskinan adalah sektor sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan daya beli masyarakat rendah dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan sehingga akan berakibat pada bertambahnya

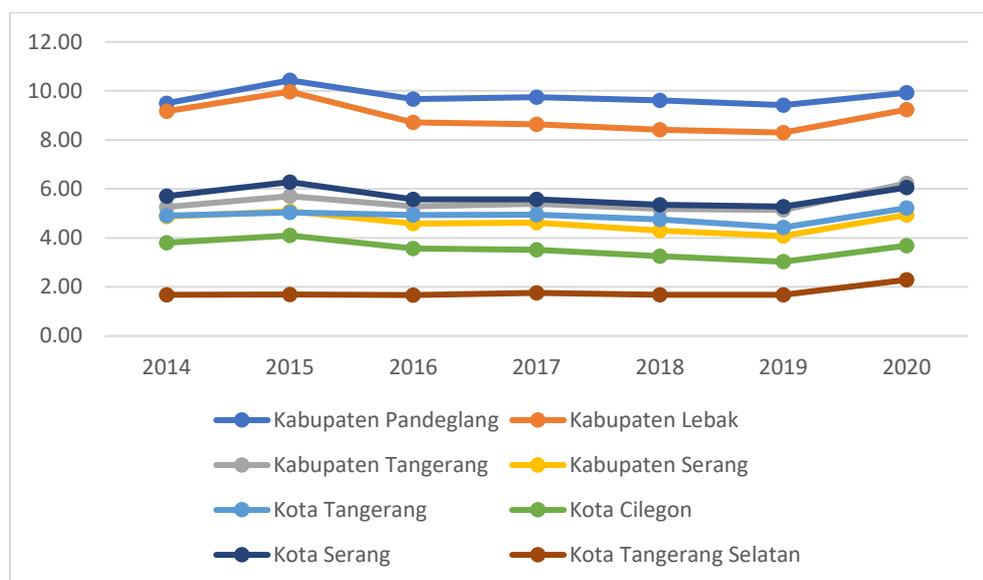
jumlah penduduk yang kekurangan pekerjaan, dengan kata lain banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara tidak langsung daya beli masyarakat menurun akibat pengangguran (Fajriawati, 2015).

Diperlukan penanggulangan yang tepat dalam menangani kondisi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten, agar target pemerintah pada angka kemiskinan dapat tercapai sehingga persentase penduduk miskin dapat menurun. Beberapa upaya melalui berbagai program telah dilakukan pemerintah provinsi Banten dalam menurunkan persentase penduduk miskin, salah satunya yang saat ini sedang digencarkan adalah Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Jamsosratu memadukan program Kementerian Sosial yakni Keluarga Harapan (PKH) dengan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang ditujukan untuk masyarakat Banten (Prabawanti, 2020).

Laju pertumbuhan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten tidak hanya diukur dari pendapatan atau ekonomi saja tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti subsidi pemerintah, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2014-2020 dilihat dari persentase penduduk miskin terus mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini disebabkan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki tingkat kemiskinan yang jauh berbeda karena masih terjadi ketidakmerataan kemiskinan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten masih belum stabil.

Gambaran kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2014-2020 dapat disimak pada grafik 1:

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

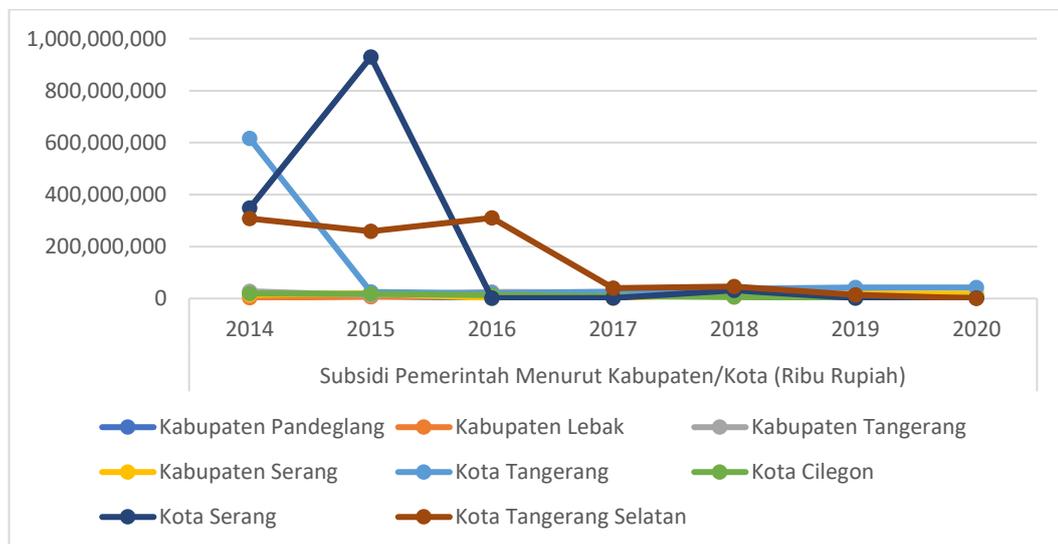
Grafik di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2014-2020. Fenomena yang terdapat di Provinsi Banten ini adalah fluktuatifnya persentase penduduk miskin, terlihat dari masing-masing Kabupaten/Kota memiliki perbedaan persentase kemiskinan yang belum merata, dan sebagian besar perbedaan tersebut masih cukup tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten ini sangat terlihat, misalnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki rata-rata persentase kemiskinan sangat tinggi hampir mendekati 10 persen dibandingkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki rata-rata persentase kemiskinan sangat rendah sekitar 1,78 persen yang berarti *range* nya kurang lebih 8 persen, dan tantangan yang harus dijalankan provinsi Banten ini adalah terhambatnya laju pengurangan persentase penduduk miskin di provinsi ini, terutama di perdesaan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2015 kemiskinan di Provinsi Banten naik dengan persentase sebesar 5,90 persen lalu pada tahun 2016 turun sebesar 5,42 persen namun di tahun 2017 meningkat kembali walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 5,45 persen. Faktor penyebab peningkatan kemiskinan ini adalah karena adanya inflasi umum yang pada September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan pada Maret-September 2016 dengan inflasi umum

sebesar 0,92 persen. Pada tahun 2018 kemiskinan dapat diturunkan hingga tahun 2019, kemudian di tahun 2020 kembali meningkat lagi mencapai 5,92 persen. Peristiwa ini terjadi karena merebaknya pandemi *Covid-19* yang telah menghambat seluruh jalannya sektor perekonomian sehingga banyak masyarakat yang dipecat karena perusahaan tidak mampu membayar gaji pegawai, dan berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin (Hidayat, et al., 2018).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah faktor subsidi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan subsidi pemerintah memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Adanya subsidi pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan. Gambaran jumlah subsidi pemerintah yang dilihat dari bantuan sosial dalam ribuan rupiah di Provinsi Banten dapat disimak pada grafik 2:

Grafik 2. Subsidi Pemerintah di Provinsi Banten Tahun 2014-2020  
(Ribuan Rupiah)



Sumber : Publikasi Kab/Kota Provinsi Banten Dalam Angka 2015-2019

Pada grafik di atas menunjukkan subsidi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten pada kurun waktu 7 tahun. Dapat disimpulkan bahwa subsidi pemerintah di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2014-2020 mengalami fluktuasi naik turun di tiap Kabupaten dan Kota.

Pada tahun 2015-2016 subsidi pemerintah di Kabupaten Pandeglang menghadapi penurunan yang cukup drastis dari Rp 9.864.124,- menjadi Rp 1.400.000,- dikarenakan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan pada tahun tersebut lahan pertanian dan potensinya cukup baik sehingga dengan adanya pengairan yang relatif cukup baik dimanfaatkan oleh petani, namun pada tahun 2017 sungai Ciliman meluap dan mengakibatkan banjir di 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang sehingga pemerintah daerah menambah dana subsidi (Bahransyaf, 2018).

Sama halnya dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang juga mengalami penurunan subsidi dari Rp 20.445.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp 1.515.100,- pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini dikarenakan terjadi ketidaksesuaian target anggaran pelaksanaan di dinas pendidikan dengan jumlah target perencanaan dalam RPJMD dalam 3 tahun dimana anggaran rehab dan pembangunan terus menurun sementara jumlah target yang dialokasikan semakin naik (Prasetya, 2019).

Kabupaten Tangerang juga mengalami hal yang sama pada tahun 2018-2020 dimana jumlah subsidi pada tahun 2018 sebesar Rp 26.662568,- menurun drastis menjadi Rp 7.089.086,- di tahun 2019-2020, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan APBD yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk kebutuhan pemerintah yang diakibatkan dari sisa lebih perhitungan anggaran SILPA di tahun 2018 serta adanya campur tangan dari pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta dalam bantuan keuangan (Web Terpadu, 2019).

Menurunnya jumlah subsidi juga terjadi di Kota Cilegon dari tahun 2015-2020, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut prosedur pendistribusian dana subsidi terlalu berbelit-belit, selain itu permasalahan sinkronisasi data kurang pengawasan dan integrasi yang tidak melibatkan ketua RT dan RW sehingga akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data yang ada di lapangan berbeda sehingga berdampak pada lambatnya penyaluran dana dan tidak tepat sasaran (Embu, 2021).

Begitu juga dengan Kota Serang yang mengalami penurunan tajam pada tahun 2015 sebesar Rp 930.000.000,- menjadi Rp 1.596.000,- di tahun 2016 yang diakibatkan karena peningkatan dana perimbangan di Provinsi Banten yang berasal

dari aliran dana alokasi khusus (DAK) yang meningkat dari tahun 2016-2018, namun sebagian besar dari dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga anggaran dana yang diperuntukkan untuk subsidi masyarakat menurun (Dewiyanti, 2019).

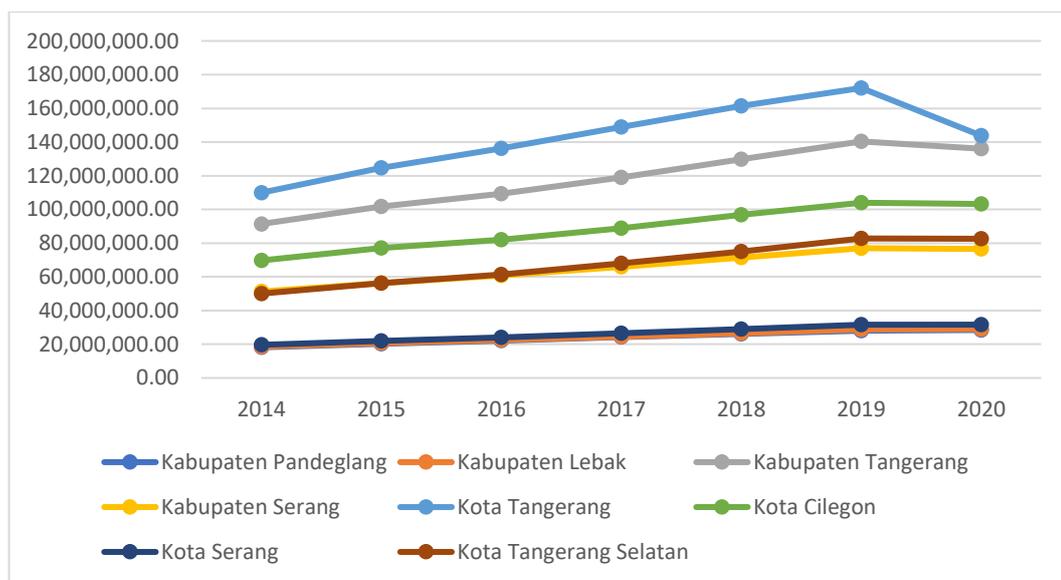
Kota Tangerang Selatan juga mengalami penurunan dana subsidi yang terjadi pada tahun 2017-2020, dimana hal ini diakibatkan oleh berkurangnya sebagian jumlah data penerima bantuan sosial setelah proses koreksi dalam sistem kementerian karena data tersebut tercatat telah dipadupadankan dengan bantuan dari sektor lain oleh karena itu data terindikasi duplikat karena menurut Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan, masyarakat hanya menerima tidak lebih dari satu jenis bantuan sosial yang diberikan dan menurun drastisnya jumlah subsidi terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar Rp 618.000 ini dikarenakan pada saat itu terjadi Pilkada sehingga struktur dan rancangan anggaran berubah (Sutrisna, 2021).

Secara keseluruhan di Provinsi Banten dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan subsidi pemerintah dikarenakan terbelit birokrasi dalam penganggarannya sehingga dibutuhkannya bantuan petugas dari Dinas Sosial dan petugas Bank BJB Banten, dan untuk tahun 2019 meningkat kembali namun pada tahun 2020 menurun karena adanya pandemi *Covid-19* (Fikri, 2020).

Adanya subsidi pemerintah ini sangat penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang sangat berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini merupakan bentuk sumbangsih pemerintah secara tidak langsung terhadap perekonomian. Dalam teori Keynes yang terdapat pada Krugman (2018) mengatakan bahwa subsidi pemerintah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang berarti dapat menurunkan angka kemiskinan. Dilihat secara keseluruhan, jumlah subsidi yang diberikan pemerintah Provinsi Banten walaupun berfluktuasi tetap diikuti pula dengan berfluktuasinya persentase kemiskinan di tahun yang sama. Hal ini menandakan bahwa subsidi pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan sesuai dengan hasil penelitian oleh Febri Umar Doni (2018), Nurul Mudhiatil Mufliha (2018), dan Andi Agustian Nababan (2020) yang menyatakan bahwa Subsidi Pemerintah mempunyai pengaruh dengan kemiskinan.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan tentunya secara keseluruhan tidak lepas dari perkembangan perekonomian dimana salah satunya mampu diukur dari parameter produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan faktor untuk menunjukkan pengukuran kemiskinan dalam mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis suatu negara. Peningkatan PDRB merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan karena jika PDRB bertambah maka kemiskinan akan berkurang. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah indikator yang digunakan pada penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan tahun berjalan untuk mengamati kekuatan sumber daya ekonomi, perputaran, dan bentuk ekonomi suatu daerah. Grafik ini adalah perkembangan PDRB menurut harga berlaku di Provinsi Banten tahun 2014-2020.

Grafik 3. PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Banten  
Tahun 2014-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik di atas dapat membuktikan perkembangan PDRB di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten tahun 2014-2020. Dapat dilihat di tiap Kabupaten/Kota Provinsi Banten mendapati kenaikan PDRB pada tiap tahunnya, yang berarti menunjukkan adanya perkembangan perekonomian di wilayah tersebut dalam 7 tahun terakhir ini. Secara keseluruhan, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Banten menghadapi penurunan PDRB pada tahun 2020, tentunya hal ini disebabkan

terjadi pandemi *Covid-19* yang menghantam pada awal Maret tahun 2020 sehingga perekonomian terhambat, namun demikian secara keseluruhan PDRB tiap tahunnya dapat dikategorikan selalu meningkat tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan menurunnya kemiskinan, namun ada beberapa kabupaten/kota yang PDRB nya cukup terlihat menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya, seperti di Kabupaten Tangerang di tahun 2019 PDRB nya sebesar Rp 140,366,143 menjadi Rp 136,005,323 dikarenakan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen namun tidak diimbangi dengan produktivitas tenaga kerja yang meningkat dalam arti pengangguran di Kabupaten Tangerang meningkat juga di tahun 2020 sebesar 13,06 persen dibanding tahun sebelumnya sehingga hal ini berdampak pada PDRB di Kabupaten Tangerang yang menurun (Anggraini, 2021).

Kabupaten Serang juga mengalami penurunan PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp 77.017.409 menjadi Rp 76.601.094 di tahun 2020, hal ini disebabkan oleh minusnya laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai -1,69 persen yang dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19* dan peningkatan inflasi di akhir tahun yang kemungkinan karena adanya lonjakan konsumsi atau daya beli masyarakat yang berlebihan sehingga beberapa komoditas persisten inflasi (Bidangkip, 2020).

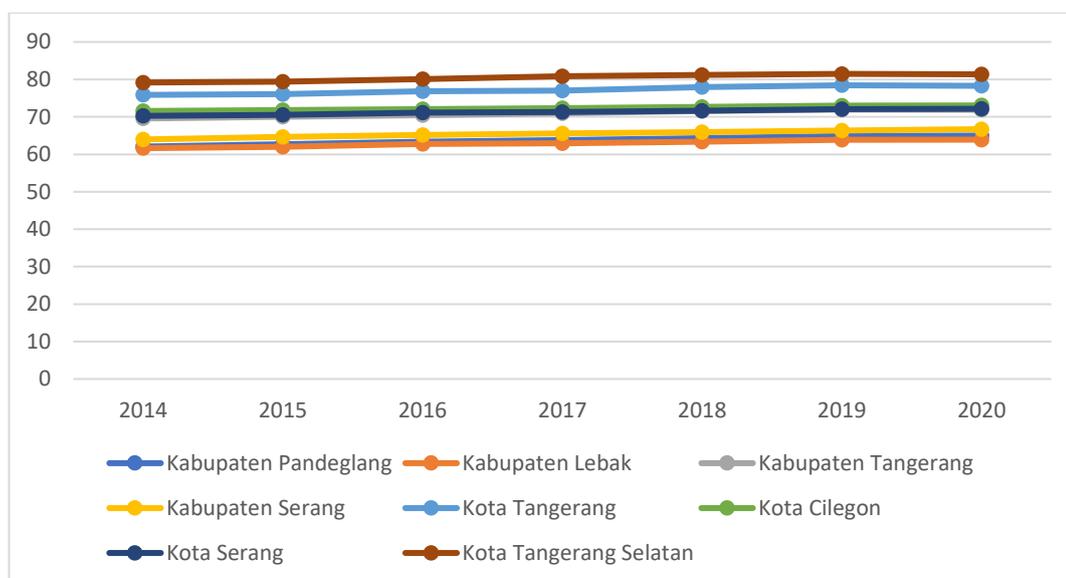
Begitu juga dengan Kota Tangerang yang mengalami hal yang sama, menurun dari Rp 175.237.821 tahun 2019 menjadi Rp 143.840.378 pada tahun 2020 dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami kontraksi atau pertumbuhannya negatif yang artinya di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan adanya pandemi *Covid-19* juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang (Tolib, 2020).

Secara keseluruhan, saat PDRB Provinsi Banten pada tahun 2015 naik sebesar Rp 478.737.918,- kemiskinan juga naik dengan tingkat 5,90 persen. Sama halnya pada tahun 2017 saat PDRB naik sebesar Rp 565,877,754,- kemiskinan pun naik dengan tingkat 5,45 persen. Hal ini tentunya menjadi fenomena dimana ini bertentangan dengan teori Keynes yang terdapat pada Krugman (2018) yang berpendapat bahwa *aggregate demand* merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh adanya *multiplier effect* yang berarti permintaan efektif bergantung pada pendapatan total yang terdiri dari permintaan

investasi dan permintaan konsumen, sehingga keseimbangan akan terbentuk dengan adanya permintaan ini. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika daya beli masyarakat tinggi dan dengan begitu tingkat kemiskinan akan menurun. Keadaan ini serupa dengan hasil riset Saputra (2012), Kikilia Amanda (2017), Nurviana Purnama Anandanisa (2018), dan M. Iksan Syuhada (2019) yang membuktikan bahwa PDRB mempunyai pengaruh dengan kemiskinan, tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Febri Umar Doni (2018) dan Akhmad dkk (2018) yang membuktikan bahwa PDRB tidak mempunyai pengaruh dengan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang kian meninggi akan menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dan bermutu tinggi, yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh *quality* dari sumber daya manusia. Rendahnya produktivitas dapat mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, ini adalah salah satu dampak yang dimunculkan dari rendahnya *quality* sumber daya manusia yang dihasilkan. Grafik ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten Tahun 2014-2020:

Grafik 4. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten  
Tahun 2014-2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa angka indeks pembangunan manusia (IPM) di tiap Kabupaten dan Kota Provinsi Banten tahun 2014-2020 secara konsisten terus mengalami kemajuan setiap tahunnya, yang mengartikan bahwa status atau level pembangunan manusia di Provinsi ini masih tertahan pada kategori tinggi. Hal ini dikarenakan Provinsi Banten hampir semuanya sudah melek huruf dan mendapat pendidikan yang cukup, serta beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti orang yang tidak mampu diberikan pengobatan gratis, pendidikan khusus dan menengah juga digratiskan, serta kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. IPM dianggap sebagai indikator strategis untuk menggambarkan hasil program pembangunan kualitas hidup manusia, semakin meningkat nilai IPM maka akan menghasilkan manusia yang berkualitas dalam segi pendidikan maupun kesehatan sehingga mampu menghidupi perekonomiannya, dengan begitu maka kemiskinan dapat diturunkan (Muhtarom, 2019).

Hal ini sesuai dengan teori Keynes yang terdapat dalam Devi Andriyani (2015) mengatakan bahwa *demand its own supply*, yang berarti *employment* meningkat karena dipengaruhi oleh ketersediaan kapasitas produksi yang belum terpakai yang tentunya berkaitan dengan modal manusia dan juga modal fisik. Secara tidak langsung ini menandakan bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan dan didukung oleh hasil penelitian dari Saputra (2011), Kikilia Amanda (2017), M. Iksan Syuhada (2019), dan Isty Karomatul Arafah (2020) yang menyatakan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan, namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Nurviana Purnama Anandanisa (2018) yang menyatakan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Saputra, 2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah” dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan tingkat

kemiskinan di Jawa Tengah. Pada penelitian oleh (Anandanisa, 2018) dengan judul “Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua” hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan kemiskinan di Papua, sedangkan variabel IPM dan Pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan kemiskinan di Papua. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mufliha, 2018) dengan judul ”Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2017” dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa variabel Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa terdapat beberapa kontradiksi antar hasil penelitian yang telah dibuktikan peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan melalui adanya penelitian ini menjadi titik terang dari perbedaan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti terdorong untuk meneliti penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Provinsi Banten jika dilihat selama tujuh tahun terakhir mengalami tingkat kemiskinan yang naik turun, terlihat pada tiap kabupaten/kota yang masing-masing memiliki tingkat kemiskinan yang belum merata, dan separuh tingkat kemiskinannya dalam kategori tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten ini sangat terlihat disaat kondisi PDRB yang sudah cukup baik setiap tahunnya yang seharusnya dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan kemiskinan secara efektif, namun subsidi pemerintah menunjukkan angka yang berfluktuatif, artinya kontribusi subsidi pemerintah jumlahnya tidak stabil setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan IPM cenderung sangat lambat dan masih terdapat daerah yang tertinggal di bawah rata-rata IPM nasional.

Menurut deskripsi yang sudah dipaparkan tersebut, didapatkan perumusan masalah yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana pengaruh subsidi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020?
- b. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020?
- c. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut perumusan masalah di atas, dirumuskan tujuan penelitian dalam menjawab permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh subsidi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020.

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan mampu tercipta dari adanya penelitian yang akan ditelaah, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dinantikan mampu membuka pemahaman dan pandangan bagi peneliti dan pembaca perihal faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yakni subsidi pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten serta melihat pengaruhnya dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Selain itu juga diharapkan sebagai bahan akademik dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Dinantikan hasil penelitian ini menjadi sebagai salah satu bentuk bahan

evaluasi dan gambaran mengenai pengimplementasian yang tepat dalam merumuskan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten serta menjadi referensi tambahan bagi pemerintahan terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

2) Bagi Peneliti

Dinantikan penelitian ini mampu menjadi latihan eskalasi ilmu pengetahuan dan acuan agar dapat berkontribusi dalam memperoleh gambaran perihal faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten seperti subsidi pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini.